



PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN ISLAM

Tim Dosen

Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan
Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia



Table of Contents

01

Peran dan Fungsi Pemerintah

02

Rasionalitas peran pemerintah dalam perekonomian

03

Ruang lingkup peran pemerintah dalam perekonomian Islam

04

Kebijakan fiskal dalam Islam

05

Kebijakan moneter dalam Islam



PERAN DAN FUNGSI PEMERINTAH

Peran dan Fungsi Pemerintah



Melindungi Integritas teritorial negara



Penegakan hak dan kewajiban negara



Administrasi Sipil



Membangun dan mengelola kerangka institusi dimana masyarakat beraktivitas



Mengelola kebebasan masyarakat



Melindungi properti right dari masyarakat



Penegakan Keadilan



Fungsi Pemerintah dalam Perekonomian

Fungsi Alokasi

- i) mekanisme pasar, dan
- ii) intervensi pemerintah.

Fungsi Distribusi

Redistribusi pendapatan dan kesejahteraan melalui instrument kebijakan ekonomi.

Fungsi Stabilisasi

- i) Pertumbuhan ekonomi yang tinggi,
- ii) menciptakan lapangan pekerjaan yang luas
- iii) stabilitas tingkat harga.

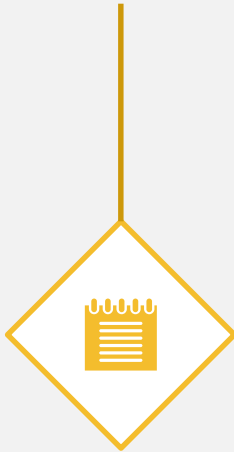




RASIONALITAS PERAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

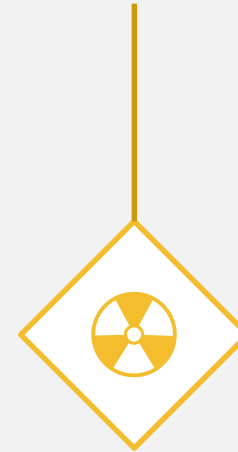
Rasionalitas Peran Pemerintah dalam Perekonomian

Pemerintah berperan penting dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi (SDE) dalam kegiatan ekonomi, sehingga dapat tercapai kesejahteraan yang optimal bagi masyarakat.



Perekonomian membutuhkan suatu regulasi agar sistem ekonomi berjalan sebagaimana diharapkan. Tidak ada suatu jaminan bahwa jika perekonomian dibiarkan bekerja secara alamiah tanpa regulasi maka perekonomian akan berjalan dengan baik.

Perekonomian seringkali mengalami fluktuasi, terkadang membaik dan terkadang memburuk. Pemerintah harus membuat berbagai upaya agar perekonomian kembali stabil dan kesejahteraan masyarakat kembali pada titik optimumnya.





RUANG LINGKUP PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN ISLAM

Ruang Lingkup Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui, tujuan ekonomi Islam adalah mencapai falah yang direalisasikan melalui optimasi maslahat. Maka secara umum tujuan peran pemerintah adalah menciptakan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat.



Menurut Al Mawardi, tugas pemerintah adalah untuk melanjutkan fungsi kenabian dalam menjaga agama Islam dan mengatur urusan urusan duniawi..



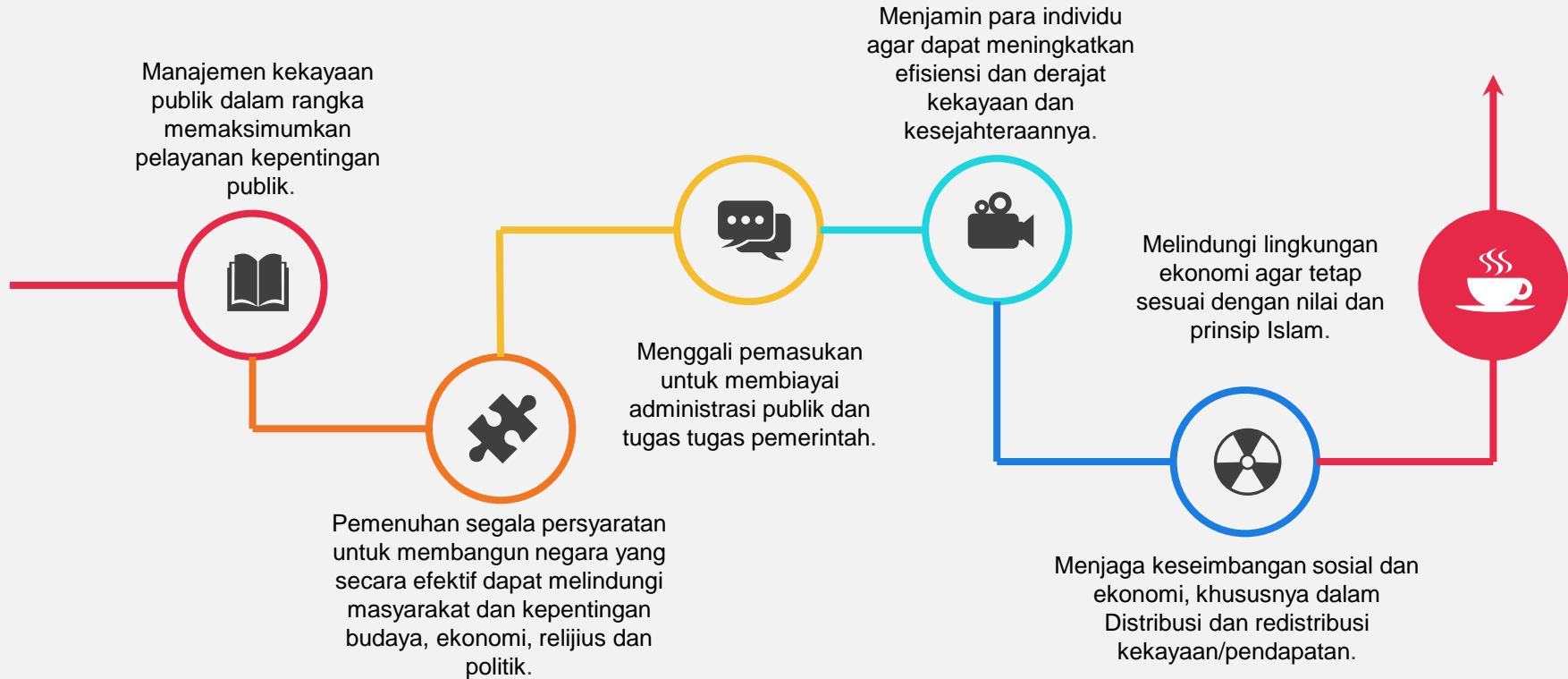
Menurut Ibnu Khaldun, eksistensi pemerintah adalah untuk memastikan agar setiap orang dapat memenuhi tujuan syariat baik dalam urusan dunia maupun akhirat



Dalam mewujudkan pasar yang islami. Pemerintah Bukan hanya bertindak sebagai “wasit” atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain (co-existing)



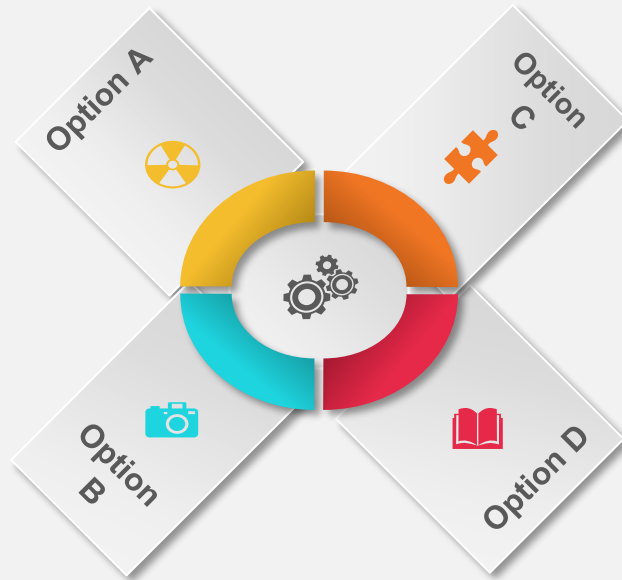
Beberapa Peran yang Harus Dilakukan Pemerintah dalam Perekonomian



Peran Pemerintah yang Berkaitan dengan Implementasi Nilai dan Moralitas Islam

Memastikan dan menjaga implementasi nilai dan moral Islam secara keseluruhan.

Memastikan dan menjaga agar pasar hanya memperjualbelikan barang dan jasa yang halal dan toyyiban.



Melebarkan nilai-nilai persaingan yang sehat (fair play), kejujuran (honesty), keterbukaan (transparency) dan keadilan (justice)

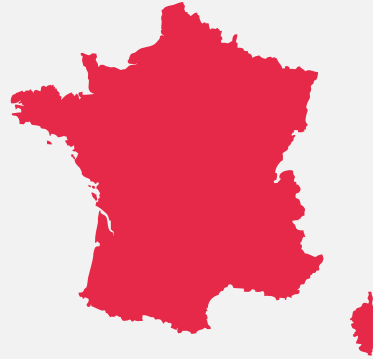
Menjaga agar pasar hanya menyediakan barang dan jasa sesuai dengan prioritas kebutuhan sebagaimana diajarkan dalam syariat Islam dan kepentingan perekonomian nasional.



Peran Pemerintah yang Berkaitan dengan Teknis Operasional Pasar



Memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan (barriers) dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan (ikhtikar), melarang kartel-kartel yang merugikan, dan lain lain.



Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing (competitiveness) dan daya beli (purchasing power) dari para pelaku pasar yang lemah. Termasuk dalam hal ini menciptakan berbagai skenario kerja sama di antara para pelaku pasar, misalnya antara produsen besar dengan kecil, untuk meningkatkan efisiensi dan pemerataan



Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar. Monopoli tidak selalu akan berdampak buruk bagi masyarakat seandainya harga yang dihasilkan tetap merupakan harga yang adil.





UPI The
Education
University
Sistem Pembelajaran Daring



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

KEBIJAKAN FISKAL DALAM ISLAM

EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

leki.upi.edu

Kebijakan Fiskal/Publik Islam

Definisi

Semua kebijakan dan juga tindakan administratif dari pemerintah yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran a□ Fiscal policy/Public Finance Management.

Kebijakan publik meliputi berbagai aktivitas yang luas, misalnya menentukan jenis barang/jasa apakah yang perlu disediakan oleh pemerintah atau masyarakat, dari mana sumber dana yang digunakan untuk penyediaan barang/jasa tersebut, bagaimana alokasi dan distribusi barang/jasa yang disediakan oleh pemerintah atau masyarakat tersebut, apakah kriteria yang digunakan untuk memutuskan apakah barang/jasa tertentu layak disediakan oleh pemerintah atau masyarakat, dan sebagainya.



Kebijakan pemerintah seringkali juga disebut sebagai kebijakan fiskal, karena kebijakan-kebijakan ini dilakukan melalui anggaran dan belanja negara (APBN) .



Oleh karenanya, kebijakan publik juga meliputi kebijakan yang dilakukan pemerintah Maupun aktivitas yang dilaksanakan masyarakat Dalam kerangka misi sosialnya.



Aktivitas pemerintah dalam perekonomian tercermin dari APBN, di mana berbagai jenis kegiatan atau kebijakan terlihat dari pospos yang ada dalam sisi pengeluaran maupun sisi penerimaan pada APBN.



Perkembangan Kebijakan Fiskal Islam

Masa Islam Klasik

Pendapatan dan sumber daya negara masih sangat kecil. Pencatatan seluruh penerimaan negara pada masa Rasulullah tidak ada. Dalam kebanyakan kasus pencatatannya diserahkan pada pengumpul zakat dan Setiap orang pada umumnya terlatih dalam masalah pengumpulan zakat



Masa Khalifah Abu Bakar

Zakat selalu didistribusikan setiap periode dengan tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan sehingga pada saat wafatnya hanya satu dirham yang tersisa dalam perbendaharaan keuangan. Ketika sumber pendanaan negara semakin menipis, ketika mendekati wafatnya, kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan negara



Masa Khalifah Umar

Umar sangat concern dengan masalah kebijakan public diantaranya:

- (1) Baitul mal;
- (2) kepemilikan tanah;
- (3) Zakat dan *Ushr*;
- (4) Sedekah untuk nonmuslim
- (5) Mata Uang;
- (6) Klasifikasi pendapatan negara; dan
- (7) Pengeluaran



Masa Khalifah Utsman

Meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru, membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan *kharaj* dan *jizya* dari Mesir



Masa Khalifah Ali

- Mendistribusikan seluruh pendapatan di baitul mal ke propinsi yang ada di Baitul Mal Madinah.
- Pengeluaran untuk angkatan laut yang ditambah jumlahnya



Sumber-Sumber Pendapatan APBN Islam



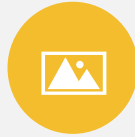
Jizyah

pajak yang dibayarkan oleh orang nonmuslim khususnya ahli kitab, untuk jaminan perlindungan jiwa, harta atau kekayaan, ibadah, bebas dari nilai-nilai dan tidak wajib militer



Kharaj

Pajak tanah dipungut dari non-muslim ketika Khaibar ditaklukkan. Tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagai pengganti sewa tanah dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara



Ushr

Ushr adalah bea impor yang dikenakan kepada semua pedagang, Dibayar hanya sekali dalam setahun dan hanya berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Rasulullah berinisiatif mempercepat peningkatan perdagangan, walaupun menjadi beban pendapatan negara.



Dharibah

Merupakan pungutan yang merupakan penutup defisit negara. pungutan yang dibebankan secara sepihak kepada warga, tidak dapat dijadikan sebagai sumber penerimaan jangka panjang sehingga hal ini akan berpengaruh Dalam memperhitungkan surplus atau defisit anggaran



Ziswaf

Iuran bersifat sukarela. Namun ada perbedaan karakteristik diantaranya, di mana zakat merupakan hal yang wajib dikeluarkan ketika telah memenuhi syarat-syarat tertentu.



Pengeluaran Pemerintah dalam Islam

Pengeluaran Zakat

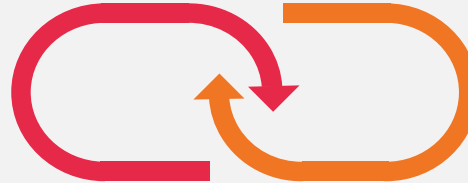
Fakir, Miskin, Amil, Muallaf, Budak, Gharim dan Fi Sabilillah.



Pengeluaran untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum, yang jika tidak dipenuhi maka ummat akan menderita

Misal: jalan umum, jembatan, bendungan, rumah sakit, masjid, sekolah, air minum, dll.

Pengeluaran untuk Kekurangan Kebutuhan Penduduk dan Pelaksanaan Kewajiban Jihad



Pengeluaran untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umum, namun jika tidak dipenuhi maka ummat tidak akan menderita

Hanya dilakukan jika Baitul Mal memiliki kelapangan dana.

Pengeluaran upah dan gaji

Misal: gaji untuk tentara, pegawai negeri, hakim, guru, dll.



Adanya unsur darurat

Misal: paceklik, banjir, angin taufan, gempa bumi, atau perang.



UPI
The Education University
Sistem Pembelajaran Daring





UPI The
Education
University
Sistem Pembelajaran Daring



KEBIJAKAN MONETER DALAM ISLAM

EKONOMI DAN BISNIS SYARIAH

leki.upi.edu

Sistem Moneter Islam



Tujuan Kebijakan Moneter pada Perekonomian Islami



Mencapai pertumbuhan Ekonomi yang seimbang dan sustain, serta memobilisasi sumber daya bagi pembangunan.



Menjaga stabilitas internal daya beli uang.



Mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil.



Menjaga stabilitas eksternal nilai tukar uang.



TERIMA KASIH



UPI The
Education
University
Sistem Pembelajaran Daring



**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA